

Strategi Komunikasi BPBD dalam Penanganan Bencana Banjir Kampung Lalang Medan Sumatera Utara

Aisyah Putri ^{1*}, Annisa Nabilah Br Ginting², Dika Sutryani³, Rahmanita Ginting⁴

^{1*,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Corresponding Email: aisyahpti03@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 22 November 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 20 Desember 2025; *Diterima* 1 Januari 2025; *Diterbitkan* 10 Januari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologis yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan Indonesia dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta kemanusiaan yang signifikan (BNPB, 2024). Kota Medan, khususnya kawasan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, merupakan wilayah yang mengalami banjir berulang akibat intensitas hujan tinggi dan meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, Babura, dan Sunggal. Data BPBD Deli Serdang pada November 2025 mencatat 16 korban jiwa, 40.094 rumah terendam, serta 207.441 jiwa terdampak banjir dan longsor di wilayah sekitar Medan. Sementara itu, BPBD Kota Medan melaporkan 3.181 rumah dan 10.391 jiwa terdampak banjir pada Oktober 2025 tanpa korban jiwa. Dalam situasi bencana, komunikasi memiliki peran strategis sebagai sarana koordinasi, penyampaian instruksi darurat, serta pembentukan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan bencana. BPBD Kota Medan berfungsi sebagai pusat komando komunikasi bencana yang mengoordinasikan informasi antarinstansi, relawan, dan masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi BPBD dalam penanganan bencana banjir di Kampung Lalang, dengan fokus pada peran komunikator, pola koordinasi, serta hambatan dalam diseminasi pesan kepada publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas strategi komunikasi BPBD dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, kejelasan alur informasi, dan sinergi lintas instansi, namun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi risiko masyarakat dan kompleksitas kondisi lapangan di kawasan rawan banjir.

Kata Kunci: Komunikasi Bencana; Strategi Komunikasi; BPBD Medan; Banjir; Kampung Lalang; Koordinasi Informasi.

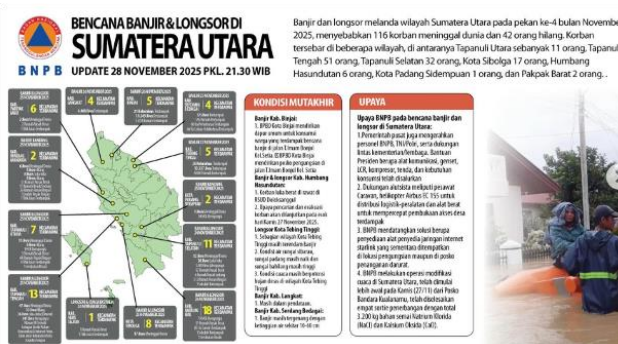
Abstract

Flooding is one of the most frequent hydrometeorological disasters in urban areas in Indonesia and causes significant social, economic, and humanitarian impacts (BNPB, 2024). Medan City, particularly the Kampung Lalang area in Medan Sunggal District, is an area that experiences repeated flooding due to high rainfall intensity and overflowing of the Deli, Babura, and Sunggal watersheds. Data from the Deli Serdang Regional Disaster Management Agency (BPBD) in November 2025 recorded 16 fatalities, 40,094 houses submerged, and 207,441 people affected by flooding and landslides in the Medan area. Meanwhile, the Medan City BPBD reported that 3,181 houses and 10,391 people were affected by flooding in October 2025 with no fatalities. In disaster situations, communication plays a strategic role as a means of coordination, conveying emergency processes, and raising public awareness of disaster management policies. The Medan City BPBD serves as a disaster communication command center that coordinates information between agencies, volunteers, and affected communities. This study aims to analyze the communication strategy of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in handling the flood disaster in Kampung Lalang, focusing on the role of communicators, coordination patterns, and obstacles in disseminating messages to the community. This study uses a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the effectiveness of the BPBD's communication strategy is influenced by the credibility of the communicators, the clarity of information flow, and synergy between agencies. However, challenges remain, such as low community risk literacy and the complexity of field conditions in flood-prone areas.

Keyword: Disaster Communication; Communication Strategy; Medan Regional Disaster Management Agency; Flood; Kampung Lalang; Information Coordination.

1. Pendahuluan

Banjir merupakan bencana hidrometeorologis yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada lingkungan, infrastruktur, dan fasilitas publik, tetapi juga memperbesar kerentanan sosial secara berlapis. Dampak berantai tersebut menuntut pengelolaan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan oleh Cinque *et al.* (2026) dan Haddow & Haddow (2023), serta diperkuat oleh Cangara (2002). Kerangka pemikiran tersebut menempatkan banjir bukan sebagai kejadian sesaat, melainkan risiko berulang yang perlu dikelola secara sistematis melalui komunikasi kelembagaan, koordinasi lapangan, dan kepemimpinan komunikasi yang tegas (Kriyantono, 2014; Effendy, 2005). Sahoo *et al.* (2025) menegaskan bahwa bencana berulang dapat menekan produktivitas sosial-ekonomi dalam jangka panjang apabila tidak disertai pengelolaan risiko dan sistem informasi kebencanaan yang efektif, adaptif, serta selaras dengan karakter publik terdampak. Sumatera Utara, terutama kawasan urban Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, menjadi wilayah dengan kejadian banjir yang meluas pada akhir tahun 2025. BPBD Deli Serdang mencatat 16 orang meninggal dunia hingga 30 November 2025, dengan 40.094 rumah terendam, 64.626 kepala keluarga (207.441 jiwa) terdampak, serta 2.609 hektare lahan tergenang (BPBD Deli Serdang, 2025). Pada peristiwa terpisah, banjir Kota Medan tanggal 12 Oktober 2025 melanda tujuh kecamatan dan 17 Kelurahan, menyebabkan 3.181 rumah, 3.599 KK (10.391 jiwa) terdampak tanpa laporan korban jiwa di wilayah administratif Kota Medan (BPBD Medan, 2025). Kampung Lalang di Kecamatan Medan Sunggal termasuk kawasan yang mengalami genangan paling berat. Wilayah tersebut selama bertahun-tahun dikenal sebagai titik rawan akibat luapan tiga Daerah Aliran Sungai utama—Deli, Babura, dan Sunggal—yang debitnya meningkat tajam saat hujan lebat terjadi dari hulu hingga hilir (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023). Peristiwa banjir dan longsor pada 26–28 November 2025 juga dipublikasikan BNPB melalui kanal media sosial berbasis data visual untuk mempercepat pemahaman publik pada fase tanggap darurat. Dalam unggahan infografis berjudul *Infografis Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh* yang dirilis akun resmi BNPB Indonesia di Instagram (2025), disebutkan bahwa banjir dan longsor terjadi serentak di beberapa provinsi di Sumatera dengan tingkat dampak yang beragam, mencakup korban jiwa, warga hilang, serta ribuan rumah dan kepala keluarga terdampak. Praktik penyebaran data visual oleh BPBD/BNPB memperlihatkan pemanfaatan media digital sebagai perangkat komunikasi darurat untuk mempercepat pemahaman situasi dan menguatkan kepatuhan masyarakat terhadap arahan resmi (Haddow, 2023).



Gambar 1. Infografis Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, update 28 November 2025 pukul 21.30 WIB

Infografis yang dirilis Posko Darurat Bencana Sumatera Utara pada 15 Desember 2025 mencatat akumulasi dampak bencana yang sangat luas di tingkat provinsi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 1.758.283 jiwa terdampak, 24.086 jiwa mengungsi, 2.285 orang mengalami luka-luka, 355 jiwa meninggal dunia, dan 84 orang dinyatakan hilang. Selain korban manusia, ratusan ribu infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Skala dampak tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana

tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan respons darurat yang terkoordinasi, dukungan logistik yang berkesinambungan, serta proses pemulihan yang melibatkan lintas sektor dan lintas instansi (Abdullah-Al-Baki & Ahmed, 2026; Platt *et al.*, 2025; Agnello *et al.*, 2025). Di tengah kondisi kebencanaan tersebut, faktor lingkungan dan tata kelola lahan turut berperan besar dalam memperburuk risiko banjir. Temuan WALHI yang dipublikasikan melalui kanal berita digital pada tahun 2025 menunjukkan bahwa deforestasi seluas 1,4 juta hektare di Sumatera selama periode 2016–2024 telah melemahkan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai secara bertahap. Penurunan daya serap tersebut meningkatkan limpasan permukaan dan mempercepat aliran air menuju wilayah hilir saat hujan ekstrem terjadi, sehingga risiko banjir di kawasan perkotaan Sumatera Utara, termasuk Kampung Lalang Medan, semakin meningkat (Reinhardt-Imjela *et al.*, 2018; Yan *et al.*, 2022; Ramadhan *et al.*, 2023; Ferreira, 2026). Maqsood *et al.* (2024) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi berbasis izin pemanfaatan lahan yang tidak disertai pengendalian lingkungan cenderung memperdalam kerentanan ekologis dan sosial masyarakat, sehingga banjir berkembang menjadi persoalan sosial dan kebijakan yang kompleks. Secara normatif, kerangka hukum lingkungan di Indonesia telah mengatur kewajiban pengelolaan risiko dan kajian lingkungan melalui instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) serta Pasal 47 ayat (1)–(2). Ketentuan tersebut mencakup kewajiban pengkajian, pengelolaan, dan komunikasi risiko lingkungan hidup. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi dan kejadian banjir berulang di Sumatera lebih mencerminkan lemahnya pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan dibandingkan dengan ketiadaan regulasi. Kondisi tersebut memungkinkan aktivitas korporasi tetap berlangsung di kawasan rentan tanpa mitigasi yang memadai, sekaligus melemahkan fungsi hidrologis DAS dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang seharusnya dapat dikendalikan (Ferreira, 2025).

Dalam situasi respons darurat, BPBD Kota Medan menjalankan fungsi komunikasi komando dan komunikasi publik untuk mengoordinasikan arus informasi antarinstansi, aparat, relawan, serta masyarakat terdampak. Kehadiran Wali Kota Medan, Rico Waas, yang meninjau langsung lokasi banjir pada 11 Oktober 2025 mencerminkan upaya pemerintah daerah membangun kedekatan komunikasi dengan warga sekaligus merespons kebutuhan lapangan, termasuk evakuasi ke fasilitas umum dan distribusi bantuan logistik (Waas, 2025; Kompas, 2025). Meskipun demikian, sejumlah penelitian menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi kebencanaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman risiko masyarakat, kredibilitas penyampai pesan, dan keterpaduan koordinasi antaraktor. Pada praktiknya, faktor-faktor tersebut masih menghadapi hambatan, terutama di kawasan permukiman padat seperti Kampung Lalang (Ginting & Simamora, 2021; Sufri & Elvin, 2025). Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara lebih terarah bagaimana strategi komunikasi BPBD Kota Medan dirancang dan dijalankan dalam penanganan banjir di Kampung Lalang. Sejumlah studi menekankan bahwa strategi komunikasi lembaga penanggulangan bencana memerlukan pemetaan publik yang cermat, pemilihan komunikator yang dipercaya masyarakat, serta sinergi lintas sektor agar proses mitigasi dan respons darurat dapat berlangsung efektif (Watanabe & Fujimi, 2025; Wang & Jiang, 2025; McLaughlin Mitchell & Pizzi, 2024). Namun, penelitian sebelumnya masih cenderung terpisah antara kajian lingkungan, kebijakan, dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka kajian untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik komunikasi kebencanaan, khususnya pada level kelembagaan BPBD Kota Medan dan respons masyarakat di wilayah rawan banjir seperti Kampung Lalang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022). Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami fenomena sosial melalui penelusuran makna yang terbentuk dari tindakan, interaksi, dan pengalaman para informan dalam situasi kebencanaan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik komunikasi yang dijalankan oleh BPBD serta respons masyarakat dalam penanganan bencana banjir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik komunikasi dan koordinasi di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan terhadap pihak BPBD, aparat setempat, relawan, dan masyarakat terdampak guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses komunikasi kebencanaan. Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui laporan resmi, arsip, serta materi komunikasi yang relevan dengan penanganan banjir.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Tahapan tersebut memungkinkan peneliti mengorganisasi data secara sistematis sehingga pola dan hubungan antartemuan dapat diidentifikasi secara jelas. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik dan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai metode dan informan, sebagaimana disarankan oleh Susanto dan Jailani (2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat pemerintah setempat, relawan kebencanaan, serta masyarakat terdampak, diketahui bahwa strategi komunikasi BPBD dalam penanganan banjir di Kampung Lalang, Sumatera Utara pada tahun 2025 dijalankan melalui pendekatan yang terencana dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Praktik komunikasi tersebut mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, fase tanggap darurat, hingga pascabencana, dengan penyesuaian pesan, media, dan metode komunikasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat (BNPB, 2024). Pada fase pra-bencana, BPBD menerapkan komunikasi yang bersifat pencegahan dan edukasi melalui sosialisasi kebencanaan, penyuluhan langsung, serta penyampaian informasi peringatan dini. Komunikasi interpersonal menjadi pendekatan utama dengan melibatkan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat sebagai penyampai pesan di tingkat lokal. Pola tersebut dinilai mampu membangun kepercayaan masyarakat serta membantu meningkatkan pemahaman terhadap risiko banjir. Selain itu, BPBD memanfaatkan media digital, seperti grup WhatsApp dan platform media sosial, untuk mempercepat penyebaran informasi. Meskipun demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pesan pra-bencana masih beragam, sehingga jangkauan dan dampak komunikasi belum merata di seluruh wilayah terdampak. Pada fase tanggap darurat, strategi komunikasi BPBD diarahkan pada penyampaian informasi yang cepat, jelas, dan tepat sasaran. Komunikasi krisis dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan kebencanaan. Informasi mengenai perkembangan situasi banjir, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta penyaluran bantuan disampaikan melalui komunikasi langsung di lapangan dan melalui media massal maupun digital. Temuan wawancara menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka yang dilakukan petugas BPBD dan relawan dinilai paling efektif karena mampu menurunkan tingkat kepanikan dan memberikan rasa aman bagi warga terdampak. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel serta gangguan jaringan komunikasi akibat kondisi banjir.

Pada fase pascabencana, komunikasi BPBD difokuskan pada proses pemulihan dan evaluasi penanganan banjir. Informasi mengenai bantuan rehabilitasi dan pemulihan disampaikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, disertai upaya menjalin dialog dengan masyarakat untuk menampung masukan dan penilaian atas penanganan yang telah dilakukan. Pola komunikasi dua arah tersebut mencerminkan upaya membangun hubungan yang lebih partisipatif. Kendati demikian, komunikasi pascabencana masih lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan fisik, sementara penguatan kesiapsiagaan jangka panjang belum menjadi perhatian utama. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi BPBD di Kampung Lalang bersifat kolaboratif dengan memadukan komunikasi interpersonal, komunikasi krisis, dan pemanfaatan media digital. Pendekatan tersebut berperan penting dalam mendukung proses penanganan banjir. Namun, keberlanjutan komunikasi kebencanaan yang berakar pada komunitas masih memerlukan penguatan agar kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dapat terbentuk secara lebih konsisten. Hambatan dalam pelaksanaan strategi komunikasi BPBD dipengaruhi oleh faktor struktural, teknis, organisatoris, dan sosial.

Hambatan utama yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, terutama ketika banjir menyebabkan gangguan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian peringatan dini, koordinasi antartetugas, serta distribusi informasi kepada masyarakat terdampak. Dalam situasi komunikasi krisis, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan faktor penentu untuk menekan risiko dan kepanikan masyarakat (Coombs, 2021). Selain kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia BPBD dan relawan turut memengaruhi efektivitas komunikasi. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah warga terdampak menyebabkan komunikasi langsung tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, sebagian warga terlambat menerima informasi penting terkait evakuasi, lokasi pengungsian, maupun bantuan logistik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas komunikasi organisasi dalam situasi darurat masih perlu diperkuat melalui peningkatan jumlah dan kompetensi personel. Hambatan lainnya berkaitan dengan faktor sosial dan kultural masyarakat, terutama perbedaan tingkat pemahaman dan persepsi risiko terhadap banjir. Sebagian warga Kampung Lalang masih memandang banjir sebagai peristiwa rutin sehingga tidak memerlukan kesiapsiagaan khusus. Persepsi tersebut menyebabkan pesan kebencanaan tidak selalu direspons secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan konsep komunikasi risiko yang menekankan bahwa pengalaman dan persepsi individu sangat memengaruhi penerimaan pesan kebencanaan (UNDRR, 2022).

Selain itu, koordinasi komunikasi lintas instansi pada fase tanggap darurat juga menghadapi kendala. Meskipun BPBD telah berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pihak, masih ditemukan ketidaksinkronan informasi di lapangan. Perbedaan alur komunikasi serta keterbatasan sistem informasi terpadu berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat dan memperlambat pengambilan keputusan. Dari perspektif komunikasi pembangunan, kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas komunikasi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan (Servaes, 2020). Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi BPBD dalam penanganan banjir di Kampung Lalang belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi kebencanaan melalui perbaikan infrastruktur komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan pendekatan komunikasi berbasis komunitas agar informasi kebencanaan dapat diterima, dipahami, dan direspons secara lebih efektif oleh masyarakat.

3.2 Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi BPBD Kota Medan dalam penanganan banjir di Kampung Lalang dilaksanakan secara berjenjang pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan menyesuaikan pola komunikasi terhadap dinamika lapangan dan karakter masyarakat terdampak. Praktik tersebut sejalan dengan pandangan Haddow, Bullock, dan Coppola (2023) yang menempatkan komunikasi bencana sebagai proses berkelanjutan yang berfungsi mengoordinasikan tindakan, mengarahkan respons publik, serta menjaga stabilitas sosial dalam situasi darurat. Keterlibatan BPBD sebagai pusat komunikasi komando memperlihatkan peran institusional komunikasi dalam menjembatani kebutuhan operasional dan kepentingan masyarakat terdampak. Pada fase pra-bencana, penggunaan komunikasi interpersonal melalui tokoh lingkungan dan pemanfaatan media digital mencerminkan upaya BPBD membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan informasi. Pola ini sejalan dengan temuan Ginting dan Simamora (2021) yang menegaskan bahwa komunikasi berbasis aktor lokal memiliki daya persuasi lebih kuat dibandingkan komunikasi formal semata, terutama di kawasan permukiman padat. Namun, variasi tingkat respons masyarakat terhadap pesan kebencanaan menunjukkan bahwa literasi risiko belum terdistribusi secara merata, sebagaimana juga ditemukan oleh Sufri dan Elvin (2025), yang menyatakan bahwa pengalaman banjir berulang sering kali membentuk sikap permisif terhadap risiko. Pada fase tanggap darurat, penekanan pada kecepatan dan kejelasan informasi melalui koordinasi lintas sektor menunjukkan penerapan prinsip komunikasi krisis.

Temuan bahwa komunikasi langsung oleh petugas dan relawan lebih efektif dalam menurunkan kepanikan mendukung argumentasi Coombs (2021) bahwa kehadiran fisik komunikator di lapangan meningkatkan kredibilitas pesan dalam situasi krisis. Kendala berupa keterbatasan personel dan gangguan jaringan komunikasi memperlihatkan bahwa efektivitas komunikasi bencana sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas organisasi, sebagaimana ditegaskan oleh Platt *et al.* (2025) dan Agnello *et al.* (2025) dalam kajian mereka mengenai tata kelola bencana perkotaan. Pada fase pascabencana, komunikasi BPBD yang berfokus pada penyampaian informasi bantuan dan evaluasi penanganan menunjukkan adanya ruang dialog dengan masyarakat. Pola komunikasi dua arah tersebut sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam komunikasi pembangunan yang dikemukakan oleh Servaes (2020). Namun, temuan bahwa komunikasi pascabencana masih lebih menitikberatkan pemulihan fisik menguatkan kritik Watanabe dan Fujimi (2025) bahwa banyak institusi penanggulangan bencana belum menempatkan penguatan kesiapsiagaan jangka panjang sebagai bagian integral dari strategi komunikasi. Hambatan komunikasi yang ditemukan—baik teknis, organisatoris, maupun sosial menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebencanaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural dan budaya masyarakat. Persepsi sebagian warga yang memandang banjir sebagai peristiwa rutin memperkuat temuan UNDRR (2022) bahwa persepsi risiko berpengaruh langsung terhadap penerimaan pesan kebencanaan. Selain itu, ketidaksinkronan informasi antarinstansi pada fase darurat mencerminkan tantangan koordinasi kelembagaan yang juga diidentifikasi oleh Abdullah-Al-Baki dan Ahmed (2026), yang menekankan pentingnya integrasi sistem informasi lintas sektor dalam pengelolaan bencana. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi BPBD Kota Medan telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam penanganan banjir di Kampung Lalang, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, literasi risiko masyarakat, serta kualitas koordinasi lintas sektor. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa komunikasi kebencanaan tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi darurat, tetapi juga menentukan keberhasilan pengelolaan risiko dan ketahanan sosial masyarakat di wilayah rawan banjir, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Wang dan Jiang (2025) serta McLaughlin Mitchell dan Pizzi (2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi BPBD Kota Medan dalam penanganan bencana banjir di Kampung Lalang pada tahun 2025 dijalankan melalui pola komunikasi yang terencana dan menyesuaikan dinamika situasi kebencanaan. Strategi tersebut diterapkan secara berjenjang pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana dengan memadukan komunikasi interpersonal, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media digital, serta komunikasi langsung di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan BPBD menyampaikan informasi kebencanaan secara relatif cepat dan jelas, sekaligus membangun kepercayaan serta keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan banjir, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan kualitatif terhadap praktik komunikasi kebencanaan (Creswell, 2018). Namun demikian, efektivitas strategi komunikasi BPBD masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi saat banjir terjadi, serta keterbatasan sumber daya manusia di lapangan menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh masyarakat terdampak secara merata. Selain faktor teknis dan organisatoris, perbedaan tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap risiko banjir turut memengaruhi penerimaan pesan kebencanaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga tidak segera merespons informasi peringatan maupun arahan evakuasi. Di sisi lain, koordinasi komunikasi antarinstansi pada situasi darurat belum sepenuhnya berjalan selaras, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidaksinkronan informasi di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi BPBD dalam penanganan banjir di Kampung Lalang belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi

kebencanaan perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur komunikasi, pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pendekatan komunikasi berbasis komunitas perlu dioptimalkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor yang aktif dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana banjir secara berkelanjutan (Effendy, 2017).

5. Daftar Pustaka

- Abdullah-Al-Baki, A., & Ahmed, B. (2026). *Integrated disaster risk governance and post-disaster recovery in flood-prone regions*. Springer.
- Agnello, A., Di Trani, M., & Russo, G. (2025). Disaster governance and institutional coordination in flood risk management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 92, 103890. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.103890>.
- Anggraini, D. (2020). Analisis penyebab banjir di kawasan perkotaan Kota Medan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 145–156.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Profil Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. BNPB.
- BNPB. (2024). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.
- BPBD Deli Serdang. (2025). *Laporan kejadian banjir dan longsor Kabupaten Deli Serdang November 2025*. BPBD Kabupaten Deli Serdang.
- BPBD Kota Medan. (2025). *Laporan penanganan banjir Kota Medan Oktober 2025*. BPBD Kota Medan.
- Cangara, H. (2002). *Pengantar ilmu komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Cinque, P., Torre, M., & Lombardi, R. (2026). Flood disasters and social vulnerability in urban environments. *Sustainable Cities and Society*, 98, 104921. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.104921>.
- Coombs, W. T. (2021). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Ferreira, S. (2025). Environmental governance, deforestation, and flood risks in Southeast Asia. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 34–49.
- Ginting, R., & Simamora, P. (2021). Komunikasi risiko bencana banjir di wilayah perkotaan Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 167–182.
- Haddow, G. D., Bullock, J. A., & Coppola, D. P. (2023). *Disaster communications in a changing media world* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.

- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. (2020). *Pengantar komunikasi massa*. RajaGrafindo Persada.
- Servaes, J. (2020). *Communication for development and social change*. SAGE Publications.
- Silitonga, R. (2021). Pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap banjir di DAS Deli. *Jurnal Geografi*, 13(1), 55–66.
- Sugiyono. (2022a). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022b). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A., & Jailani. (2023). Validitas dan triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 7(1), 1–12.
- West, R., & Turner, L. H. (2022). *Introducing communication theory: Analysis and application* (8th ed.). McGraw-Hill Education.